

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Ke Hadirat Allah SWT dan atas berkah dan rahmat-Nya Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Kol. Inf. H. M. Syukur Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 dapat tersusun. Dokumen ini merupakan dokumen penting yang berperan sebagai panduan dalam menentukan arah program dan kegiatan di RSJD Kol. Inf. H. M. Syukur Provinsi Jambi untuk lima tahun ke depan.

Kami berharap dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) RSJD Kol. Inf. H. M. Syukur Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran dan perlindungan serta jalan yang terang kepada kita semua dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mewujudkan Jambi yang Maju, Aman, Tertib, Amanah dan Profesional di bawah ridho Allah SWT. Aamiin.

Jambi, Januari 2025
Direktur

Irg. Iwan Hendrawan, MARS
Pembina TK. I
NIP. 197407292006041010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	7
2.1 Gambaran Layanan RSJD Kol. Inf. H.M. Syukur Provinsi Jambi	7
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis RSJD Kol. Inf. H.M. Syukur Provinsi Jambi.....	36
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	41
3.1 Tujuan Renstra RSJD Kol.Inf. H.M.Syukur Provinsi Jambi 2025-2029	41
3.2 Sasaran Renstra RSJD Kol.Inf. H.M.Syukur Provinsi Jambi 2025-2029	41
3.3 Strategi RSJD Kol.Inf. H.M.Syukur Provinsi Jambi.....	41
3.4 Arah Kebijakan RSJD Kol. Inf. H.M.Syukur .Provinsi Jambi	41
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	47
4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	47
BAB V. PENUTUP	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Sarana dan Prasarana RSJD Provinsi Jambi Tahun 2024	10
Tabel 1.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan RSJD Kol. Inf. H. M. Syukur Provinsi Jambi .	21
Tabel 1.3 Ketegorisasi Kinerja.....	24
Tabel 1.4 Pemanfaatan Fasilitas RSJD Kol. Inf. H.M. Syukur Provinsi Jambi	28
Tabel 1.5 Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Tahun 2024	30
Tabel 1.6 Jumlah Penyakit Tertinggi pada Kunjungan Rawat Jalan.....	30
Tabel 1.7 Jumlah Penyakit Tertinggi pada Kunjungan Rawat Inap	31
Tabel 1.8 Pendapatan berdasarkan Penerimaan Pelayanan Rawat Inap.....	33
Tabel 1.9 Pendapatan berdasarkan Penerimaan Pelayanan Rawat Jalan	34
Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis	40
Tabel 3.4 Penahapan Renstra PD.....	44
Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD.....	45
Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD.....	42
Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD	45
Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	49
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama PD	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organsasi RSJD Kol. Inf. H. M.Syukur Provinsi Jambi	9
Gambar 1.2 Grafik Perbandingan Keadaan Pegawai RSJD Kol. Inf. H. M.Syukur Provinsi Jambi Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya.....	18
Gambar 1.3 Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Golongan RSJD Kol. Inf. H. M. Syukur Provinsi Jambi Tahun 2024	19
Gambar 1.4 Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin RSJD Kol. Inf. H. M.Syukur Provinsi Jambi Tahun 2024.....	19
Gambar 1.5 Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan RSJD Kol. Inf. H. M.Syukur Provinsi Jambi Tahun 2024	20
Gambar 1.6 Pendapatan RSJD Kol. Inf. H.M. Syukur Provinsi Jambi	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul selama kurun waktu lima tahun. Rencana Strategis RSJD Kol. Inf. H. M. Syukur Provinsi Jambi disusun berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah tersebut dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan kebutuhan pelayanan masyarakat di masa datang dengan mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029.

Penyusunan Rencana Strategis RSJD Kol. Inf. H. M. Syukur Provinsi Jambi tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah RSJD Kol. Inf. H. M. Syukur Provinsi Jambi dalam menyusun Rencana Kerja dan sebagai acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan dalam kurun waktu lima tahun yang akan dibahas dalam rangkaian Musrenbang. Pembiayaan program kegiatan yang ada dalam Rencana Strategis berasal dari Sumber Dana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) dan anggaran BLUD.

Pengembangan RSJD Kol. Inf. H. M. Syukur Provinsi Jambi ke depan memerlukan langkah konkret dengan membuat perencanaan strategis yang matang dan komprehensif serta dapat menjangkau dan memperkirakan baik secara kualitatif maupun kuantitatif terhadap pencapaian substansi sesuai tugas dan fungsi, dengan mendasarkan pada kondisi masa kini dan tuntutan kebutuhan pelayanan masyarakat di masa datang. Rencana yang berisikan langkah-langkah selama 5 (lima) tahun ke depan tersebut dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis yang antara lain berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program dan kegiatan untuk 5 (lima) tahun ke depan yang dijabarkan juga dalam rencana tiap tahunnya melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA), sehingga menjadi pedoman dan acuan untuk menyelenggarakan dan melaksanakan program dan kegiatan.

Kedudukan Rencana Strategis RSJD Kol. Inf. H. M. Syukur Provinsi Jambi merupakan keberlanjutan dan penjabaran lebih lanjut dari visi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang Program dan kegiatan didalamnya sesuai dengan program dan kegiatan RSJD Kol. Inf. H. M. Syukur Provinsi Jambi.

Kebutuhan akan kesehatan merupakan kebutuhan yang sangat penting sehingga tuntutan akan pelayanan kesehatan yang optimal oleh masyarakat sangat tinggi. Menyikapi hal ini, RSJD Kol. Inf. H. M. Syukur Provinsi Jambi berusaha untuk memenuhi tuntutan tersebut

dengan terus meningkatkan mutu pelayanan kesehatannya, layanan yang sudah diberikan selama ini khususnya pelayanan kesehatan jiwa dan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), peningkatan mutu tersebut berupa peningkatan dari segi tenaga , sarana dan prasarana maupun fasilitas yang ada.

Rencana strategis RSJD Kol. Inf. H. M. Syukur Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 merupakan hasil penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RSJD Kol. Inf. H. M. Syukur Provinsi Jambi untuk lima tahun ke depan. Visi dan Misi tersebut dikumpulkan melalui strategi yang dijabarkan ke dalam bentuk sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai dalam melaksanakan arah kebijakan dan program-program kesehatan.

Penyusunan Rencana Strategis RSJD Kol. Inf. H. M. Syukur Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat yang berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan seperti keluarga miskin.

Selain itu, Rencana Strategis RSJD Kol. Inf. H. M. Syukur Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 juga disusun sesuai dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 yaitu Mewujudkan Jambi MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT, yang selanjutnya dijabarkan melalui misi-misi:

- 1 Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.
- 2 Memantapkan Daya saing Daerah dan Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata.
- 3 Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumberdaya Manusia.

Rencana Strategis RSJD Kol. Inf. H. M. Syukur Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 ini mencakup perencanaan program-program kesehatan. Selanjutnya program-program tersebut dituangkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan tahunan, dan diaplikasikan pada saat penyusunan anggaran berbasis kinerja dengan mengacu pada sasaran program RSJD Kol. Inf. H. M. Syukur Provinsi Jambi. Rencana kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Strategis RSJD Kol. Inf. H. M. Syukur Provinsi Jambi akan dilaksanakan tiap tahunnya melalui Dana APBD Provinsi Jambi yang tertuang dalam RKA dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSJD Kol. Inf. H. M. Syukur Provinsi Jambi.

Selain dari itu Rencana Strategis RSJD Kol. Inf. H. M. Syukur Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang memiliki hubungan vertikal dengan

RPJMN dan RPJMD Provinsi Jambi serta juga memiliki hubungan horizontal dengan Perangkat Daerah lainnya.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis RSJD Kol. Inf. H. M. Syukur Provinsi Jambi ini adalah landasan idiil Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Landasan operasional meliputi semua ketentuan dan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
6. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024.
24. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
25. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
26. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenclatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
28. Instruksi menteri Dalam Negeri Nomor 2 Yahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025 – 2029;

29. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 12).
32. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2026 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi
33. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025- 2029;
34. Surat Edaran Nomor : 100.3.6/976/BAPPEDA-2.1/V/2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Strategis RSJD Kol. Inf. H. M. Syukur Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan bidang Kesehatan; khususnya yang terkait dengan pelayanan dan kesehatan jiwa dan NAPZA, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, hingga dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama yang kuat dan konsisten serta menjamin keselarasan program pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan Kesehatan Provinsi Jambi secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Adapun Penyusunan Renstra RSJD Kol. Inf. H. M. Syukur Provinsi Jambi Tahun 2025 -2029 bertujuan:

1. Sebagai pedoman dalam perencanaan, pemilihan program dan kegiatan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan daerah untuk 5 tahun ke depan, tahun 2025-2029.

2. Menjabarkan program dan pelayanan yang akan dilaksanakan oleh RSJD Kol. Inf. H. M. Syukur Provinsi Jambi dalam kurun waktu 5 tahun, mulai dari tahun 2025 hingga tahun 2029.
3. Sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan RSJD Kol. Inf. H. M. Syukur Provinsi Jambi
4. Menjadi pedoman dalam rencana kerja tahunan dan rencana kerja dan anggaran serta rencana bisnis anggaran periode 2025-2029.
5. Sebagai tolak ukur untuk penilaian keberhasilan pelaksanaan pelayanan dan evaluasi kinerja RSJD Kol. Inf. H. M. Syukur Provinsi Jambi periode 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra RSJD Kol. Inf. H. M. Syukur Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi RSJD Kol. Inf. H. M. Syukur Provinsi Jambi
- 2.2 Sumber Daya RSJD Kol. Inf. H. M. Syukur Provinsi Jambi
- 2.3 Kinerja Pelayanan RSJD Kol. Inf. H. M. Syukur Provinsi Jambi
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan Renstra RSJD Kol. Inf. H. M. Syukur Provinsi Jambi 2025-2029
- 3.2 Sasaran Renstra RSJD Kol. Inf. H. M. Syukur Provinsi Jambi 2025-2029
- 3.3 Strategi RSJD Provinsi Jambi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra RSJD Kol. Inf. H. M. Syukur Provinsi Jambi 2025-2029
- 3.4 Arah Kebijakan RSJD Kol. Inf. H. M. Syukur Provinsi Jambi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra RSJD Kol. Inf. H. M. Syukur Provinsi Jambi 2025-2029

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS RSJD KOL. INF. H. M. SYUKUR JAMBI

2.1. Gambaran Pelayanan RSJD Kol. Inf. H.M. Syukur Provinsi Jambi

2.1.1. Tugas, fungsi dan struktur RSJD Kol. Inf. H.M. Syukur Provinsi Jambi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi No. 21 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja RSJD Kol. Inf. H. M. Syukur Provinsi Jambi, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas

Menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa dan ketergantungan Napza dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

2. Fungsi

- a. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan jiwa perorangan dan masyarakat melalui pelayanan kesehatan paripurna;
- b. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kesehatan dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan jiwa;
- d. Pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan jiwa;
- e. Pelayanan medis;
- f. Pelayanan penunjang medis dan non medis;
- g. Pelayanan keperawatan;
- h. Pelayanan rujukan;
- i. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- j. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pemberdayaan masyarakat;
- k. Pengelolaan keuangan dan akuntansi;
- l. Pengelolaan urusan sumber daya manusia, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

RSJD Kol. Inf. H. M. Syukur Provinsi Jambi senantiasa berusaha menjalankan Peraturan Gubernur Jambi No. 21 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja RSJD Kol. Inf. H. M. Syukur Provinsi Jambi dengan baik, namun demikian banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan RSJD Kol. Inf. H. M. Syukur Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Secara umum perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yang pertama adalah ketersediaan dana dan yang kedua adalah kapasitas aparatur perencana yang masih perlu ditingkatkan.

Pihak yang paling berpengaruh terlibat dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah saat ini mencakup ASN lingkup RSJD Kol. Inf. H. M. Syukur Provinsi Jambi. Sedangkan dinamika yang paling berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan adalah perubahan kondisi ekonomi wilayah, regional, nasional dan global.

Memperhatikan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan RSJD Kol. Inf. H. M. Syukur Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya RSJD Kol. Inf. H. M. Syukur Provinsi Jambi selalu berusaha meningkatkan kapasitas perencanaan melalui koordinasi-koordinasi dengan stakeholder yang terkait, dan selalu berusaha meningkatkan kapasitas sumber daya yang dimiliki.

3. Struktur Organisasi RSJD Kol. Inf. H.M. Syukur Jambi

RSJD Kol. Inf. H. M. Syukur Provinsi Jambi merupakan salah satu SKPD Pemerintah Provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2002 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dan pada tahun 2008 mengalami reorganisasi sesuai dengan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2008. Namun, sesuai Keputusan Gubernur Jambi No.149/Kep.Gub/RSJD/2011 tanggal 7 April 2011, Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah, dimana 100% pendapatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dapat digunakan langsung untuk membiayai operasional kegiatan rumah sakit.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah dibentuklah RSJD sebagai UPTD yang bersifat khusus yang memberikan layanan kesehatan jiwa dan ketegantungan Napza serta pelayanan penunjang kesehatan lainnya secara profesional, yang dipimpin oleh seorang Direktur.

UPTD bersifat khusus yang dimaksud adalah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian. Otonomi dalam pengelolaan

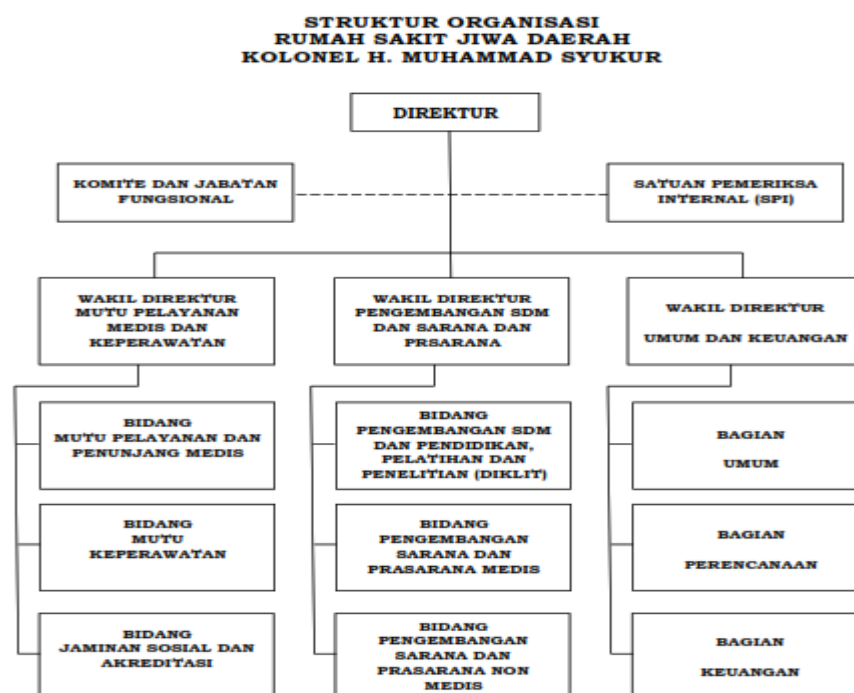
keuangan dan barang milik Daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah. RSJD Kolonel H. Muhammad Syukur sebagai Unit Organisasi bersifat khusus memiliki hubungan kerja dengan Dinas yang bersifat koordinasi. Koordinasi dimaksud adalah dalam rangka sinkronisasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kesehatan Daerah. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kesehatan daerah merupakan bagian dari tugas dan fungsi Dinas sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang kesehatan di daerah.

Perubahan Nomenklatur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi menjadi RSJD Kol. Inf. H. M.Syukur Provinsi Jambi ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi No. 21 Tahun 2024 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja RSJD Kol. Inf. H. M.Syukur Provinsi Jambi yang ditetapkan pada tanggal 23 Agustus 2024.

Perubahan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Kol. Inf. H. M.Syukur Provinsi Jambi ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi No. 10 Tahun 2025 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja RSJD Kol. Inf. H. M.Syukur Provinsi Jambi yang ditetapkan pada tanggal 26 Mei 2025.

RSJD Kol. Inf. H. M.Syukur Provinsi Jambi merupakan unsur pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi RSJD Kol. Inf. H. Muhammad Syukur Jambi



2.1.2 Sumber Daya RSJD Kol. Infanteri H.M. Syukur Jambi

1. Sarana dan Prasana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi, alat transportasi, alat kesehatan dan kedokteran, dan alat penunjang lainnya. Kondisi sarana prasarana di RSJD Kol. Inf. H. M.Syukur Provinsi Jambi sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja, namun tetap diperlukan pengembangan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Saat ini aset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di RSJD Kol. Inf. H. M.Syukur Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Daftar Sarana dan Prasarana RSJD Kol.Inf.H.M.Syukur Provinsi Jambi Tahun 2024

a. Bangunan

No	Uraian	Luas (m2)	Kondisi
1	Ruang Administrasi & Manajemen	604	2 Lt /baik
2	Gedung Instalasi Gawat darurat	380	1 Lt / baik
3	Gedung Instalasi Rawat Jalan I :	550	Baik
	a. Poli Jiwa anak & remaja		
	b. Poli Jiwa Dewasa		
	c. Poli Jiwa Psikogeatri (Lansia)		
	d. Poli Napza		
	e. Poli Gigi		
	f. Ruang Farmasi		
	g. Ruang Rekam medik		
	h. Ruang Laboratorium		
	i. Ruang PKRS		
	j. Ruang Admision		
	k. Ruang JKN Centre		
	l. Ruang Pengaduan masyarakat		
4	Instalasi Rawat Jalan II : (2 Lantai)	757	Baik
	a. Poli Syaraf		
	a. Poli Syaraf		
	b. Poli Anak		
	c. Poli Penyakit dalam		
	d. Poli Akupuntur		
	e. Poli Okupasi Terapi		
	f. Ruang Komite Medik		
	g.Ruang Psikometri		
5	Gedung Radiologi	176	Baik
6	Gedung Dapur Gizi	861	Baik

7	Instalasi Rawat Inap :		
	a. Ruang UPIP / ALFA		
	b. Ruang Epsilon	408	Baik
	c. Ruang Beta	560	Baik
	d. Ruang Gama	380	Baik
	e. Ruang Teta	361	Baik
	f. Ruang Delta	408	Baik
	g. Ruang Srikandi	380	Baik
	h. Ruang Yudistira	468	Baik
	i. Ruang Arjuna	336	Baik
	j. Ruang Shinta	336	Baik
	k. Ruang Sigma	275	Baik
	l. Ruang Pega	378	Baik
	m. Ruang Arimbi	275	Baik
	n. Ruang Omega (Geriatri)	380	Baik
	o. Ruang Zetta	384	Baik
	p. Ruang Lambda	435	Baik
8	Gedung Gudang Central	2400	Baik
9	Perpustakaan	285	Baik
10	Gedung Laundry	88	Baik
11	Instalasi Pengolahan Air Limbah	20	Baik
12	Tempat Penyimpan Sementara Limbah B3	80	Baik
13	Tempat Pembuangan Sampah Sementara	180	Baik
14	Gedung IPRS(Workshop)	282	Baik
15	Aula (ruang Pertemuan)	300	Baik
16	Ruang Diklat (seminar, komkordik, ULP)	350	Baik
17	Tempat Ibadah (Mushola)	287	Baik
18	Rumah Dinas Dokter Spesialis	236	2 unit/ Baik
19	Rumah Dinas Perawat	70	5 unit/ Baik
20	Rumah Dinas Perawat	70	4 Unit/ Baik
21	Asrama Mahasiswa	36	5 Unit/Baik
22	Pos Satpam	25	Baik
23	Kantin	9	Baik
24	Hall Badminton	66	Baik
25	Driver		Baik
26	Ruang Generator/Genset		Baik
27	Tempat Parkir Roda Dua		Baik
28	Tempat Penitipan Anak	-	Baik
30	Garasi Kendaraan Roda 4	66	Baik
31	Gudang Asset	24	Baik
32	Gedung Arsiparis		Baik
33	Instalasi Farmasi		Baik
34	Ruang Rawat Inap Non Jiwa		Baik
35	Ruang Jenazah		Baik

36	Kumbung Budidaya jamur	132	Baik
----	------------------------	-----	------

b. Sarana Transportasi

No	Uraian	Jumlah	Ket
1.	Kendaraan Roda 2	22 Unit	Baik
2.	Kendaraan Roda 3	1 unit	Baik
3.	Kendaraan Operasional roda 4	12 Unit	Baik
4.	Ambulan roda 4	3 unit	Baik
5.	Ambulan Roda 4 (Lama)	2 Unit	Rusak Berat

c. Peralatan Medis

No	Uraian	Jumlah	Ket
A.	INSTALASI GAWAT DARURAT :		
1.	Syring Pump	1 Set	Baik
2.	EKG	1 Set	Baik
3.	DC Shock	2 Set	Baik
4.	BHD Set	2 Set	Baik
5.	Minor Surgeri set :	1 Set	Baik
	· Pinset Anatomi	2 Buah	Baik
	· Klem Arteri 14 cm	1 Buah	Baik
	· Klem Arteri 12 cm	1 Buah	Baik
	· Arteri Klem Bengkok Kecil	1 Buah	Baik
	· Allis Tissue And Organ Hol Feb 15 cm	2 Buah	Baik
	· Nald Foulder 20 cm	1 Buah	Rusak
	· Handle Bisturi	1 Buah	Baik
	· Gunting Perban	1 Buah	Baik
	· Gunting Jaringan Bengkok lurus 17 cm	1 Buah	Baik
	· Gunting Jaringan Bengkok lurus 15 cm	1 Buah	Baik
6.	Bengkok sedang	3 Buah	Baik
7.	Bengkok kecil	6 Buah	Baik
8.	Bak Instrumen Besar	1 Buah	Baik
9.	Bak Instrumen Sedang	2 Buah	Baik
10.	Bak Instrumen Kecil	3 Buah	Baik
11.	Stetoscop	2 Buah	Baik
12.	Ever Light Black	2 Buah	Baik

13.	Operation Lamp	1 Buah	Baik
14.	Autoclave	1 Buah	Baik
15.	Standar Infuse	3 Buah	2 baik 1 Rusak
16.	Meja Troli Kecil	4 Buah	Baik
17.	Pen Light	1 buah	Baik
18.	Neck Cholar	2 Buah	Baik
19.	Tabung O2 Besar	5 Buah	Baik
20.	Tabung O2 Kecil	2 Buah	Baik
21.	Troli 2 Besar	3 Buah	Baik
22.	Skope Strecher (brankard)	2 buah	Baik
23.	Regulator O2	3 Buah	Baik
24.	THT Set	1 Buah	Baik
25.	Suction + Nebilizer	3 Buah	1 Baik 2 Rusak
26.	Nebulizer	1 Buah	Baik
27.	Strerilisator Rebus Sedang	1 Buah	Baik
28.	Sterilisator rebus Kecil	2 Buah	Rusak
29.	Ambu Bag	3 Buah	Baik
B.	INSTALASI RAWAT JALAN :		
1.	Poliklinik Jiwa		
	- Stetoscop	1 Buah	Baik
	- Timbangan Tegak	1 Buah	Baik
	- Nerkeben	1 Buah	Baik
	- Bak Injeksi Kecil	1 Buah	Baik
	- Rak/Brankar Injeksi	1 Buah	Baik
	- Korentang	1 Buah	Baik
	- Senter Kecil	1 Buah	Baik
2.	Poliklinik Saraf		
	- Tempat Tidur Pasien	1 Buah	Baik
	- Meja Pasien	1 Buah	Baik
	- Tensi Air Raksa	1 Buah	Baik
	- Kursi Roda Pasien	1 Buah	Baik
	- Timbangan Dewasa Tegak	2 Buah	Baik
	- X-Ray Viewer Single	1 Buah	Baik

	- Tensi Air Raksa	1 Buah	Baik
	- Stetoscope	2 Buah	Baik
	- Tabung Oxigen Kecil	1 Buah	Baik
	- Korentang	1 Buah	Baik
	- Tempat Korentang	1 Buah	Baik
	- Tensi Tegak	1 Buah	Baik
C.	ELEKTROMEDIK :		
1.	EEG	1 Unit	Baik
2.	EMG Cadwil	1 Unit	Baik
D.	RUANG RAWAT INAP :		
1.	Tempat Tidur Pasien	340 Buah	Baik
2.	Lemari Pakaian Pasien	3 Buah	Baik
3.	CCTV	3 Set	Baik
4.	Kamera CCTV (Indoor Camera)	24 Buah	Baik
5.	Tensimeter	13 Buah	2 Rusak
6.	Stetoscop	13 Buah	Baik
7.	Standar Infus	13 Buah	Baik
8.	Tabung Oksigen	6 Buah	Baik
9.	Kursi Roda	12 Buah	Baik
10.	Meja Instrumen	6 Buah	Baik
11.	Timbangan BB	13 Buah	4 Rusak
12.	Pinset Anatomi	7 Buah	Baik
13.	Pinset Cirurgi	3 Buah	Baik
14.	Tali Fiksasi	15 Buah	Baik
E.	INSTALASI RADIOLOGI :		
1.	USG	1 Unit	Baik
2.	Screen Green	3 Unit	Baik
3.	Grid Lysolm	3 Unit	Baik
4.	Marker (alat rontgen)	1 Unit	Baik
5.	Hanger (alat rontgen)	1 Unit	Baik
6.	TLD (alat rontgen)	6 Unit	Baik
7.	Apron Radiologi	2 Unit	Baik
8.	Lampu Wiwieng Box	1 Box	Baik
9.	General X-Ray 500 mA	1 Unit	Baik
10	Patient Trolley	1 Unit	Baik

11.	Automatic Film Processing	1 Unit	Baik
12.	Panoramic Merk Villa	1 Unit	Baik
F.	INSTALASI LABORATORIUM :		
1.	Microscope/Manual Monocular	1 Unit	Kurang Baik
2.	Spectro Photo Meter	1 Unit	Kurang Baik
3.	Drug Monitoring	1 Unit	Rusak
4.	Centrifuge	4 Unit	2 Baik, 2 KB
5.	Alat Labor Kimia LL (lensa objektif)	1 Unit	Baik
6.	Alat Labor Kimia LL (Haemocytometer)	2 Unit	Kurang Baik
7.	Trombelastograph Hemostasis Analyser	1 Unit	Baik
8.	Medical Sterilizer	1 Unit	Baik
9.	Hematologi Analyzer	1 Unit	Baik
10.	Automatic Blood Chemistry Analyzer	1 Unit	Baik
11.	Alisa Automatic analyser	1 Unit	Baik
12.	Mikroskop Kamera	1 Unit	Baik
13.	Drug Monitoring System	1 Unit	Baik
14.	Urine Analyzer	1 Unit	Baik
15.	Alat pemeriksa urine lengkap	1 Unit	Baik
16.	Automatic Blood Chemistry Analyzer	1 Unit	Baik
17.	Autoclave	1 Unit	Baik
18.	Medical refrigerator	1 Unit	Baik
19.	Multi Check Glucosa, Cholesterol, Urid Acid Hematology Analyzer	1 unit	Baik
20.	Mikroskop Binocular	1 Unit	Baik
21.	Alat kimia Darah (Roche)	1 Unit	Baik
G.	RUANG ISOLASI JIWA :		
1.	APD untuk Petugas Kesehatan : (Masker, Sepatu Boots, Gaun/Sarung Tangan/Kaos Kaki, Disposable, Kaca Mata Googles, Tutup Wajah, Apron)	1 Set	Baik
2.	Peralatan untuk Pasien :		
	- Thermometer	1 Unit	Baik

	- Stetoscope	1 Unit	Baik
	- Sphygmomanometer	1 Unit	Baik
	- Tourniquet	1 Set	Baik
	- Intra Vena Set	1 Set	Baik
	- Pole	1 Set	Baik
	- Basin	1 Unit	Baik
	- Mobile Screen	1 Set	Baik
	- Bedpain	1 Set	Baik
	- Bed Line	1 Set	Baik
H.	INSTALASI REHABILITASI MEDIK		
1.	Kursi Exercise	1 Unit	Baik
2.	EMG	1 Unit	Baik
3.	Interferential Therapi (Vacum)	3 Unit	Baik
4.	Micro Wave	2 Unit	Baik
5.	Diatermy	1 Unit	Baik
6.	Short Wave Diatermy	1 Unit	Baik
7.	Faradic Therapy	2 Unit	Baik
8.	Ultrasound Therapy	1 Unit	Baik
9.	Lazer Therapy	2 Unit	Baik
10.	Traction Unit	1 Unit	Baik
11.	Upper Limb Therapy	1 Unit	Baik
12.	Lower Limb Therapy (Wheel)	2 Unit	Baik
13.	Parallel Bar	1 Unit	Baik
14.	Static Cycle	1 Unit	Baik
15.	Treadmill (Power ECG)	3 Unit	Baik
16.	Kursi Roda Pasien	1 Unit	Baik
17.	Traction Unit	1 Unit	Baik
18.	Ultra Short Wave Diathermy	2 Unit	Baik
19.	Infra Red Lamp Therapy	1 Unit	Baik
20.	Examination Table	1 Unit	Baik
21.	Exerciser	3 Unit	Baik
22.	Electric Stimulator	3 Unit	Baik
23.	Ultrasound Therapy	1 Unit	Baik
24.	Iron Dumble Track	1 Unit	Baik
25.	Quadiceps Table	1 Unit	Baik

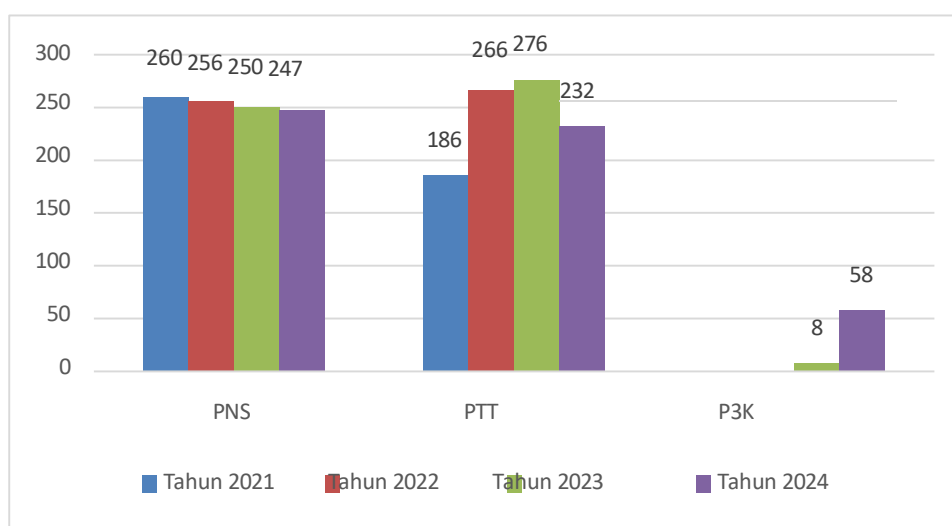
26.	Tensi Tegak	1 Unit	Baik
27.	Nebulizer	1 Unit	Baik
I.	ALAT INSTALASI REHAB. MENTAL :		
1.	Alat Pertukangan		
	a. Mesin Bubut	1 Buah	Baik
	b. Sugu Listrik	3 Buah	Baik
	c. Alat Spong	1 Buah	Baik
	d. Gergaji	8 Buah	Baik
2.	Alat Pertanian		
	a. Cangkul	8 Buah	Baik
	b. Tajak	10 Buah	Baik
	c. Arit	1 Buah	Baik
	d. Parang Panjang	10 Buah	Baik
	e. Cangkul Kecil	1 Buah	Baik
	f. Lori	1 Buah	Baik
3.	Alat Tata Boga		
	a. Panic Kukusan Besar	1 Buah	Baik
	b. Kualo Besar	1 Buah	Baik
	c. Kualo Sedang	3 Buah	Baik
	d. Kualo Kecil	1 Buah	Baik
	e. Panci Sedang	1 Buah	Baik
J.	RUANG SEKLUSI UPIP (ALPA)		
1.	CCTV	1 Buah	Baik
2.	Kamera CCTV	8 Buah	Baik
3.	Tempat tidur pasien	20 Buah	Baik
4.	Tensimeter	1 Buah	Baik
5.	Stetoskop	1 Buah	Baik
6.	Standard infus	1 Buah	Baik
7.	Tabung Oksigen	1 Buah	Baik
8.	Kursi Roda	1 Buah	Baik
9.	Meja Instrumen	1 Buah	Biak
10.	Timbangan BB	1 Buah	Baik
11.	Pinset Anatomi	1 Buah	Baik
12.	Pinset Cirurgi	2 Buah	Baik
13.	Tali Fiksasi	24 Buah	Baik

2. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan tugas RSJD Kol. Inf. H. M.Syukur Provinsi Jambi yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesehatan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi RSJD Kol. Inf. H. M.Syukur Provinsi Jambi, RSJD Kol. Inf. H. M.Syukur Provinsi Jambi di dukung sumberdaya yang tersebar dalam Instansi Induk Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.

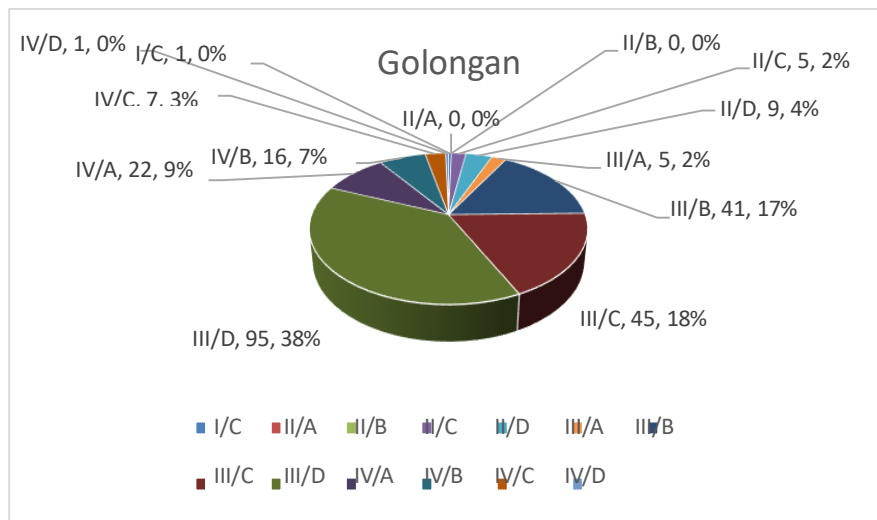
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi RSJD Kol. Inf. H. M.Syukur Provinsi Jambi diperlukan SDM yang kompeten dan berkualitas. Kondisi SDM di RSJD Kol. Inf. H. M.Syukur Provinsi Jambi sampai dengan 31 Desember 2024, tercatat sebanyak 537 orang dengan rincian Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 247 orang, pegawai PPPK 58 orang, dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 232 orang. Secara kelembagaan terdapat 9 pejabat struktural, 397 pejabat fungsional tertentu, dan 131 pejabat fungsional umum. Berikut perbandingan keadaan pegawai RSJD Kol. Inf. H. M.Syukur Provinsi Jambi dengan tahun sebelumnya:

Gambar 1.2
Grafik Perbandingan Keadaan Pegawai
RSJD Kol. Inf.H.M.Syukur
Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya



Dari grafik diatas terlihat adanya penurunan jumlah PNS sebanyak 3 orang dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya pegawai yang meninggal dan pegawai yang pensiun. Sedangkan untuk tenaga PTT terdapat pengurangan jumlah sebanyak 44 orang dari tahun sebelumnya karena telah lulus PPPK, serta ada penambahan pegawai PPPK sebanyak 50 orang pada tahun 2024.

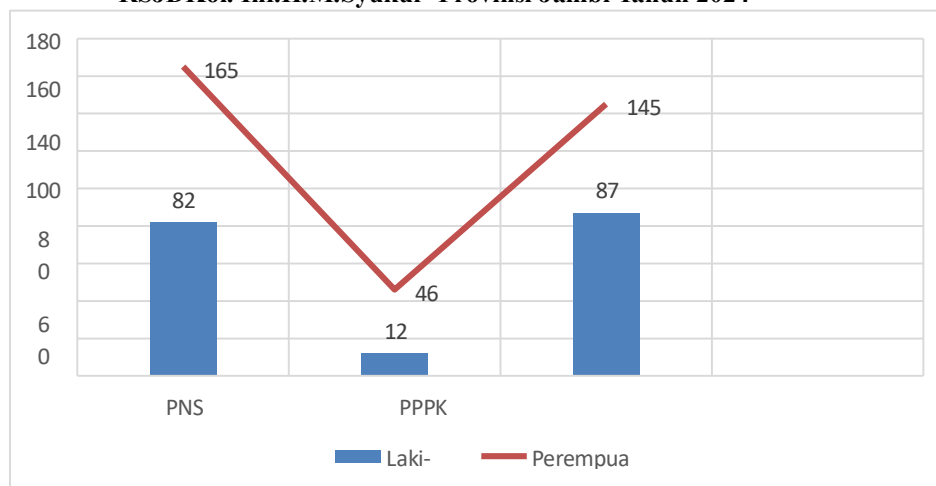
Gambar 1.3
Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Golongan
RSJD Kol.Inf.H.m.Syukur Provinsi Jambi Tahun 2024



Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat bahwa pegawai RSJD Kol. Inf. H. M. Syukur Provinsi Jambi didominasi oleh pegawai golongan III yaitu sebanyak 75,30% dan yang terbanyak yaitu golongan III/D sebesar 38 %.

Profil kepegawaian berdasarkan eselon dan jenis kelamin RSJD Kol. Inf. H. M. Syukur Provinsi Jambi dapat dilihat pada gambar berikut:

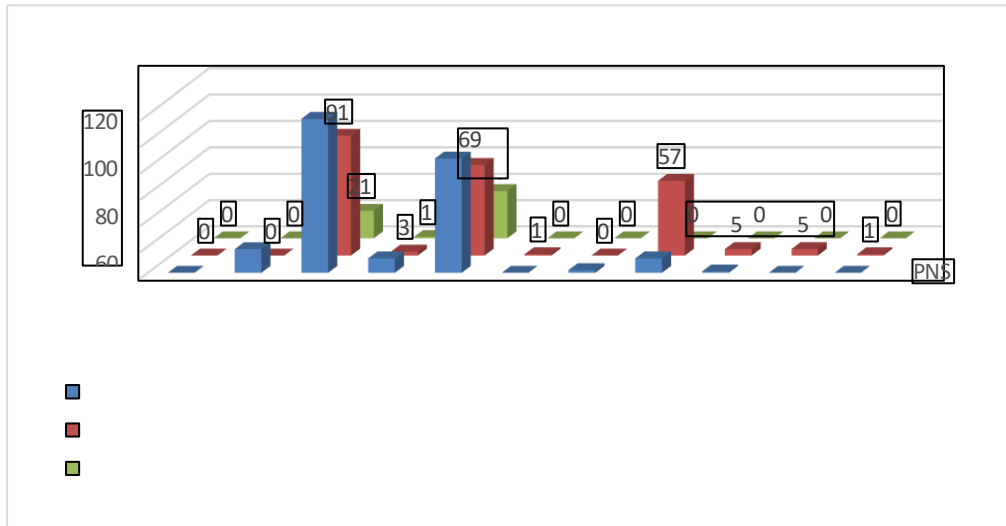
Gambar 1.4
Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin
RSJD Kol. Inf.H.M.Syukur Provinsi Jambi Tahun 2024



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa di RSJD Kol. Inf. H. M. Syukur Provinsi Jambi belum mencerminkan keseimbangan gender dimana jumlah pegawai laki-laki dan perempuan baik yang menduduki jabatan struktural (Eselon), fungsional tertentu dan fungsional umum jumlahnya belum seimbang. Terdapat pegawai Perempuan sebanyak 356 orang sedangkan pegawai laki-laki sebanyak 181 orang. Dapat diambil kesimpulan bahwa di RSJD Kol. Inf. H. M. Syukur Provinsi Jambi didominasi oleh pegawai perempuan.

Profil kepegawaian RSJD Kol. Inf. H. M.Syukur Provinsi Jambi berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.5
Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan
RSJD Kol.Inf.H.M.Syukur Provinsi Jambi Tahun 2024



Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, kondisi pegawai di RSJD Kol. Inf. H. M.Syukur Provinsi Jambi lebih banyak didominasi oleh Sarjana S1 dan Sarjana D3 terkait dengan jabatan fungsional perawat dan dokter yang membutuhkan tingkat pendidikan sarjana dan juga keterampilan.

2.1.3. Kinerja Pelayanan RSJD Kol. Infanteri H.M. Syukur Jambi

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

**Tabel T-C 23 Pencapaian Kinerja Pelayanan
RSJD Kol. Inf. H. M. Syukur Jambi**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi RSJD Provinsi Jambi	Target NSPK (Normal standar prosedur kriteria)	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100%	-	-	-	100%	100 %	100 %	-	-	94,68 %	100%	94,71 %	-	-	94,68%	100%	94,71 %
2	Persentase administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	-	95%	-	-	-	95%	95%	95%	-	-	67,16 %	96%	-	-	-	70,69%	101%	-
3	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan	-	96%	-	-	-	96%	96%	96%	-	-	89,98 %	96%	-	-	-	93,73%	100%	-
4	Persentase Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	-	98%	-	-	-	98%	98%	98%	-	-	88,60 %	69%	91,55 %	-	-	90,41%	70%	93,42 %
5	Persentase Pengadaan barang milik daerah	-	90%	-	-	-	90%	90%	90%	-	-	-	-	-	-	-	119,55 %	-	-

	penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan																		
6	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap RSJ	-	82%	-	85%	85%	83%	84%	84%	82%	80%	99,23 %	84%	99,65 %	96,4%	94,11%	77,32%	100%	118,63 %
7	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	-	85%	-	-	-	85%	85%	85%	-	-	65,72 %	85%	-	-	-	101,98 %	100%	-
8	Persentase Terpeliharanya Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	95%	-	-	-	95%	95%	95%	-	-	96,88 %	95%	99,79 %	-	-	101,85 %	100%	105,04 %
9	Persentase Fasilitas Pelayanan, sarana & prasarana dan alat kesehatan yang terpenuhi	-	95%	-	-	-	95%	95%	95%	-	-	96,76 %	74%	99,63 %	-	-	91,27%	78%	104,87 %
10	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKKM dan UKM Rujukan	-	95%	-	-	-	95%	95%	95%	-	-	86,71 %	92%	98,77 %	-	-	-	97%	103,97 %

	Tingkat daerah Provinsi																		
	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	-	-	97%	97%	97%	-	-	-	97%	-	-	-	-	100%	-
	Persentase Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan akreditasi	-	-	-	-	-	98%	98%	98%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan

RSJD Kol. Inf. H. M. Syukur Provinsi Jambi telah melakukan penilaian yang dilaksanakan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data, selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capai kinerja dapat dilihat di tabel di bawah:

Tabel 1.3
Kategorisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sasaran 1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
-----------	--

Sasaran ini dicapai melalui program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yang operasionalnya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Peningkatan Pelayanan BLUD

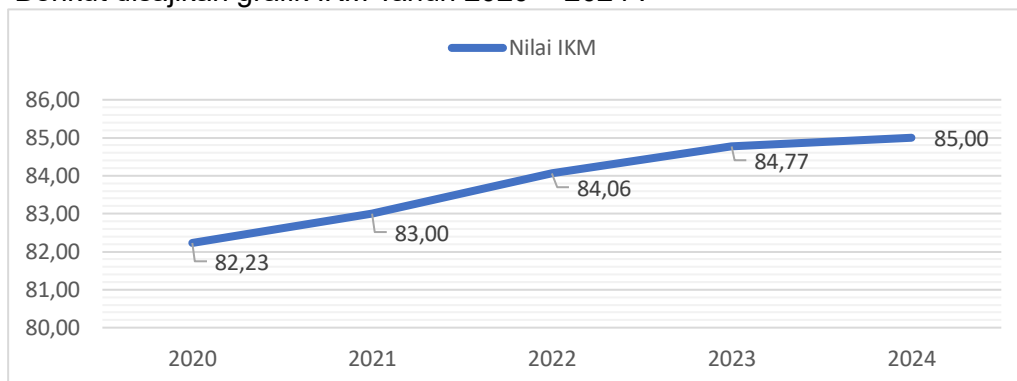
Keberhasilan pencapaian sasaran 1 ini diukur melalui predikat nilai IKM yang mana untuk Indikator Strategis Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi adalah nilai IKM > 85. Adapun pencapaian untuk sasaran ini adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KODE WARNA
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Nilai IKM	Nilai	85	85	100%	Hijau Tua

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

INDIKATOR	CAPAIAN 2021	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN (%) 2024
Nilai IKM	83	84,06	84,77	84	85	100,92%

Berikut disajikan grafik IKM Tahun 2020 - 2024 :



Berdasarkan tabel dan grafik di atas maka terjadi peningkatan Nilai IKM terhadap pelayanan di RSJD Kol. Inf. H. M.Syukur Provinsi Jambi. Nilai IKM untuk Tahun 2024 adalah 85 jadi jika dibandingkan dengan target (> 85) maka Persentase Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat pelanggan RSJD Kol. Inf. H. M.Syukur Provinsi Jambi sebesar 100 %.

Sasaran 2	Meningkatnya kualitas implementasi akuntabilitas kinerja, dengan indikator kinerja yaitu Predikat AKIP
-----------	--

Sasaran ini dicapai dengan memantapkan kebijakan terkait kepemimpinan dan manajemen kesehatan yang baik dan akuntabel agar pelaksanaan program kesehatan bisa lebih efektif, efisien dan adil melalui program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang operasionalnya didukung oleh kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Keberhasilan pencapaian sasaran 2 diukur melalui predikat SAKIP yang mana untuk Indikator Strategis RSJD Kol. Inf. H. M.Syukur Provinsi Jambi adalah nilai predikat SAKIP B.

Adapun pencapaian untuk sasaran ini adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KODE WARNA
Meningkatnya kualitas implementasi akuntabilitas kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja	Predikat	BB	BB	70,08	Kuning Tua

RSJD Kol. Inf. H. M.Syukur Provinsi Jambi mendapat predikat BB untuk nilai SAKIP dengan capaian 70,08 % pada tahun 2024. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya maka RSJD Kol. Inf. H. M.Syukur Provinsi Jambi telah meningkat menjadi predikat BB dengan nilai yang sama sebesar 70,08 %. Hal ini berarti Pada Tahun 2024, RSJD Kol. Inf. H. M.Syukur Provinsi Jambi telah sesuai dengan target awal RPJMD.

INDIKATOR	CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2021	CAPAIAN 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN (%) 2024
Predikat AKIP	B	B	B	BB	BB	70,08

Sasaran 3	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja yaitu Nilai IKM
-----------	--

Sasaran ini dicapai melalui program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang operasionalnya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

Keberhasilan pencapaian sasaran 3 ini diukur melalui predikat nilai IKM yang mana untuk Indikator Strategis RSJD Kol. Inf. H. M.Syukur Provinsi Jambi adalah nilai IKM > 85.

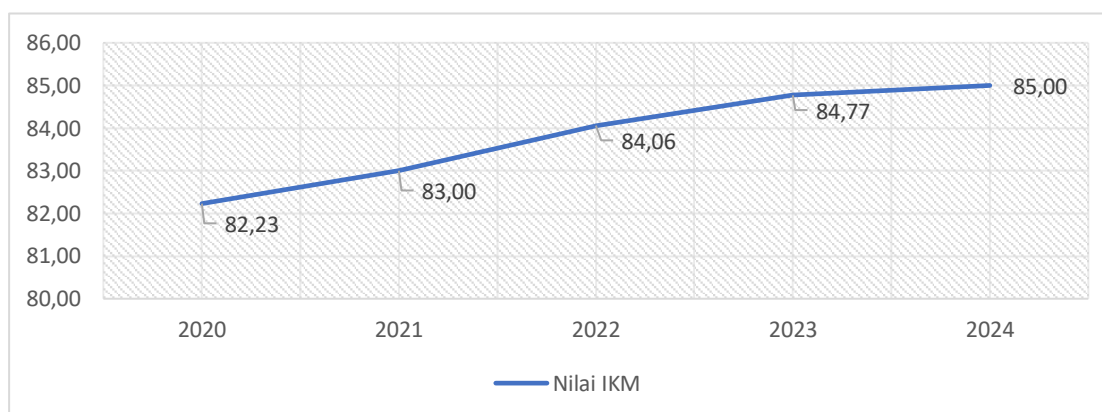
Adapun pencapaian untuk sasaran ini adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KODE WARNA
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Nilai IKM	Nilai	85	85	100%	Hijau Tua

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

INDIKATOR	CAPAIAN 2021	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN (%) 2024
Nilai IKM	83	84,06	84,77	84	85	100,92%

Berikut disajikan grafik IKM Tahun 2020 - 2024 :



Berdasarkan tabel dan grafik di atas maka terjadi peningkatan Nilai IKM terhadap pelayanan di RSJD Kol. Inf. H. M. Syukur Provinsi Jambi. Nilai IKM untuk Tahun 2024 adalah 85 jadi jika dibandingkan dengan target (> 85) maka Persentase Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat pelanggan RSJD sebesar 100 %.

2.1.5. Utilisasi dan Pemanfaatan

Indikator ini menggambarkan tentang angka pemanfaatan tempat tidur yang tersedia, lama hari perawatan. Kinerja nyata dari kinerja yang direncanakan tidak sesuai karena terjadinya perubahan cara penghitungan BOR, BTO, LOS, TOI di mana pembagiannya berdasarkan kelas, tidak lagi total keseluruhan.

Berikut kami tampilkan tabel yang menggambarkan tentang hasil pemanfaatan fasilitas Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 1.4
Pemanfaatan Fasilitas RSJD Kol. Inf. H.M. Syukur

NO	URAIAN	SATUAN	2023	2024
1.	Σ hari Perawatan (HP)	Hari	58.609	55.123
2.	Σ Lama Dirawat (LD)	Hari	56.648	56.838
3.	Jumlah Tempat Tidur (TT)	TT	290	212
4.	Persentase Pemakaian TT (BOR)	%	62	71
5.	Rata2 Lama Dirawat (AVLOS)	Hari	15	33
6.	Selang Waktu TT kosong (TOI)	Hari	10	13
7.	NDR	<25 per 1000	0,02	0,02
8.	GDR	<45 per 1000	0,02	0,03
9.	Frekuensi Pemakaian Tempat Tidur periode Waktu (BTO)	Kali	14	8
10.	Pasien Keluar	org	3.643	1.703
11.	Σ Pas meninggal	org	6	8
12.	Pas. <48 jam	org	0	2
13.	Pas. >48 jam	org	6	6

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja RSJD Kol. Inf. H. M.Syukur Provinsi Jambi Tahun 2024, antara lain sebagai berikut :

- a. Terpenuhinya kebutuhan tenaga dokter sub spesialis jiwa anak dan remaja, dokter spesialis bedah, dokter spesialis anestesi melalui MOU dengan masing-masing tenaga tersebut.
- b. Terjadinya peningkatan pemanfaatan RS oleh masyarakat dalam mendapatkan pelayanan
- c. Terpenuhinya sebagian kekurangan tenaga , meningkatkan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan. Pada tahun 2024 terdapat pengangkatan tenaga PPPK sebanyak 50 orang.
- d. Terpenuhinya sebagian kebutuhan sarana, prasarana RS termasuk peralatan medik dan non medik. Pada tahun 2024, RSJD Kol. Inf. H. M.Syukur Provinsi Jambi berupaya memenuhi sebagian kebutuhan Alat Kesehatan untuk Ruang Operasi maupun Ruang ICU yang sudah ada ruangannya. Adapun alat Kesehatan yang diadakan pada tahun 2024 melalui anggaran DAK 2024 sebesar Rp. 1.425.000.000 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Alat Bedah Set sebanyak 1 Unit
 2. Lampu Operasi sebanyak 1 Unit

3. Meja Operasi sebanyak 1 Unit

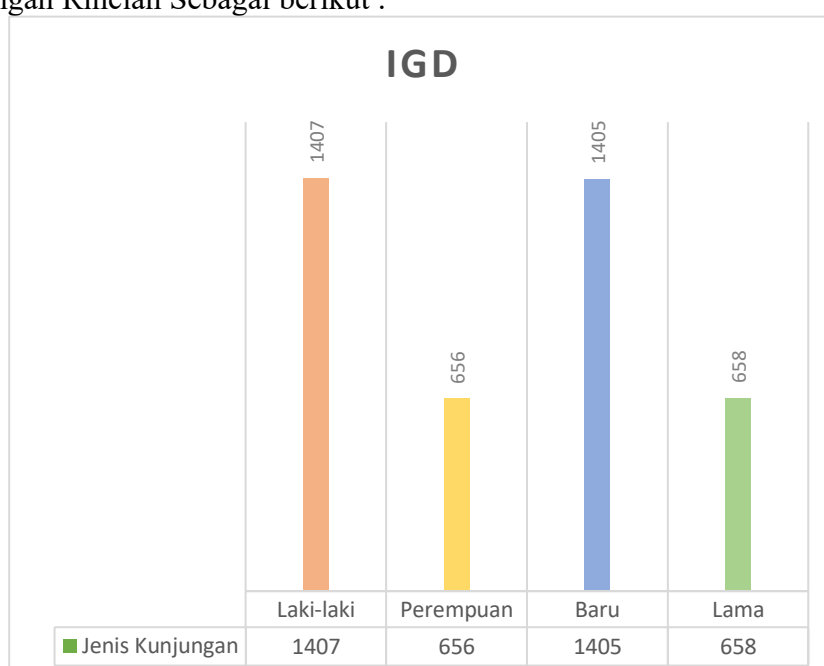
- e. Meningkatnya promosi kesehatan jiwa baik melalui media cetak maupun elektronik.
- f. Meningkatnya pelayanan kesehatan jiwa dan rehabilitasi NAPZA melalui kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK), pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pencapaian kinerja RSJD Kol. Inf. H. M. Syukur Provinsi Jambi Tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

- a. Belum tersedianya dokter spesialis tetap/full time untuk pelayanan spesialis radiologi untuk memenuhi standar pelayanan RS.
- b. Profesionalisme SDM yang belum optimal dengan pelaksanaan *reward* dan *punishment* yang jelas juga dirasakan masih kurang.
- c. Belum lengkapnya sarana dan prasarana untuk pelayanan kesehatan yang memenuhi standar Rumah Sakit.
- d. Manajemen aset Rumah Sakit sebagai pendukung pelayanan kesehatan yang bermutu yang masih belum optimal.
- e. Sistem layanan (SIMRS) yang belum optimal mengingat kemajuan teknologi informasi yang pesat sehingga Rumah Sakit perlu memperhatikan pentingnya manajemen sistem informasi, agar dapat digunakan untuk monitoring dan evaluasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pasien.

2.1.7 Jumlah Kunjungan Pasien

Pada tahun 2024 jumlah kunjungan Instalasi Gawat Darurat berjumlah 2.063 Kunjungan dengan Rincian Sebagai berikut :



Pada tahun 2024 jumlah kunjungan rawat jalan berjumlah 41.147 kunjungan dengan Rincian Sebagai berikut:

Tabel 1.5
Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Tahun 2024

No	Jenis Kunjungan	Jumlah Kunjungan
1.	POLIKLINIK SPESIALIS JIWA	17.425
2.	POLIKLINIK DALAM	140
3.	SPESIALIS REHAB MEDIK	605
4.	KLINIK NEUROLOGI/SYARAF	4.725
5.	I G D	2.005
6.	KLINIK GIGI / MULUT	837
7.	KLINIK AKUPUNKTUR	540
8.	LABORATORIUM	5.135
9.	KLINIK PSIKOLOGI	665
10.	KLINIK FISIOTERAPI	1.852
11.	RADIOLOGI	169
12.	I P W L/NARKOBA	287
13.	PTRM	97
14.	SPESIALIS ANAK	44
15.	OKUPASI TERAPI	2.217
16.	TERAPI WICARA	260
17.	MEDICOLEGAL	253
18.	MMPI	3.331
19.	MCU	560
	TOTAL	41.147

Selama kunjungan rawat jalan dan rawat inap tahun 2024 masih di dapat angka tertinggi penyakit pada kunjungan Rawat Jalan, untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.6
Jumlah Penyakit Tertinggi pada Kunjungan Rawat Jalan

No	Diagnosa	Jumlah Kunjungan
1.	Shizophrenia Unspecified	13.010
2.	Anxiety Disorder, Unspecified	6.966
3.	Schizoprenia	1.059

4.	Panic Disorder	946
5.	Essential (Primary) Hypertension	907
6.	Paranoid Schizophrenia	899
7.	Mixed Anxiety and Depressive Disorder	847
8.	Developmental Disorder of Speech and Language, Unspecified	836
9.	Generalized Anxiety Disorder	693
10.	Sequelae of Stroke, Not Specified as Haemorrhage or Infarction	466
TOTAL		26.359

Sepuluh (10) diagnosa terbanyak pada kunjungan rawat inap, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.7
Jumlah Penyakit Tertinggi pada Kunjungan Rawat Inap

No	Diagnosa	Jumlah Kunjungan
1.	Schizofrenia	1.065
2.	Schizofrenia Hebeprenik	166
3.	Other Stimulant Use, Unspecified	130
4.	Psychotic Disorder	73
5.	Schizofrenia Paranoid	70
6.	Mental and Behavioural disorders due to use of alcohol	52
7.	Gangguan Mental Organik	44
8.	Schizofrenia, Unspecified	25
9.	Bipolar Affective Disorder, Unspecified	4
10.	Depressive Episode	2
TOTAL		1.631

2.1.8 Realisasi Anggaran

Pencapaian sasaran yang telah ditargetkan oleh RSJD Kol. Inf. H. M.Syukur Provinsi Jambi tidak terlepas dari adanya dukungan dana yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSJD Kol. Inf. H. M.Syukur Provinsi Jambi Tahun 2024, dan Anggaran Penerimaan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.

Penerimaan RSJD Kol. Inf. H. M.Syukur Provinsi Jambi tahun 2024 bersumber dari :

- a. Pelayanan Rawat Jalan
- b. Pelayanan Rawat Inap
- c. BPJS Kes
- d. Non BPJS Kes
- e. Penerimaan lain-lain yang sah
- f. Jasa Giro

Sesuai Keputusan Gubernur Jambi No.149/Kep.Gub/RSJD/2011 tanggal 7 April 2011, RSJD Kol. Inf. H. M.Syukur Provinsi Jambi telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah, di mana 100% pendapatan RSJD Kol. Inf. H. M.Syukur Provinsi Jambi dapat digunakan langsung untuk membiayai operasional kegiatan rumah sakit.

Pada tahun 2024, penerimaan RSJD Kol. Inf. H. M.Syukur Provinsi Jambi yang masuk ke dalam dana BLUD sebesar Rp. 18.448.856.775,- dan dana SiLPA Tahun 2024 sebesar Rp. 3.517.974.636,- sehingga total pendapatan RSJD Kol. Inf. H. M.Syukur Provinsi Jambi sampai akhir Desember 2024 sebesar Rp. 21.966.831.411,-. Untuk jelasnya, berikut ditampilkan tabel rincian pendapatan RSJD Kol. Inf. H. M.Syukur Provinsi Jambi Tahun 2024 berdasarkan sumber :

No	Uraian	Jumlah Penerimaan (Rp)
1.	BPJS Kes.	11.582.447.318
2.	Non BPJS Kes.	2.199.362.997
3.	Pelayanan Kesehatan	4.500.099.288
4.	Jasa Layanan Lain yang Sah	77.634.500
5.	Jasa Giro	89.312.672
	Jumlah	18.448.856.775

Berikut ditampilkan tabel rincian pendapatan RSJD Kol. Inf. H. M.Syukur Provinsi Jambi Tahun 2024 berdasarkan penerimaan pelayanan rawat inap :

Tabel 1.8
Pendapatan berdasarkan Penerimaan Pelayanan Rawat Inap

No	Uraian	Jumlah Penerimaan (Rp)
1.	Perawatan	828.253.794
2.	Visite Dokter Spesialis	21.285.000
3.	Visite Dokter Umum	23.095.000
4.	Jasa Evaluasi Psikolog	590.000
5.	Visum	1.500.000
6.	Jasa Sarana	-
7.	Jasa Pelayanan	-
8.	Laboratorium	21.687.200
9.	Gigi	190.000
10.	Fixasi & Tindakan Lain	722.000
11.	Rehabilitasi Mental / Asesmen	4.330.000
12.	Asuhan Keperawatan	9.682.500
13.	Terapi Aktivitas Individu	22.721.500
14.	Terapi Aktivitas Kelompok	8.255.000
15.	Terapi Aktivitas Keluarga	1.797.500
16.	Terapi Aktivitas Insentif	2.462.500
17.	Karcis / ADM	3.160.000
18.	Obat-obatan	55.705.187
19.	Intervensi Psikososial	37.000.000
Jumlah		1.042.437.181

Berikut ditampilkan tabel rincian pendapatan RSJD Kol. Inf. H. M.Syukur Provinsi Jambi Tahun 2024 berdasarkan penerimaan pelayanan rawat jalan :

Tabel 1.9 Pendapatan berdasarkan Penerimaan Pelayanan Rawat Jalan

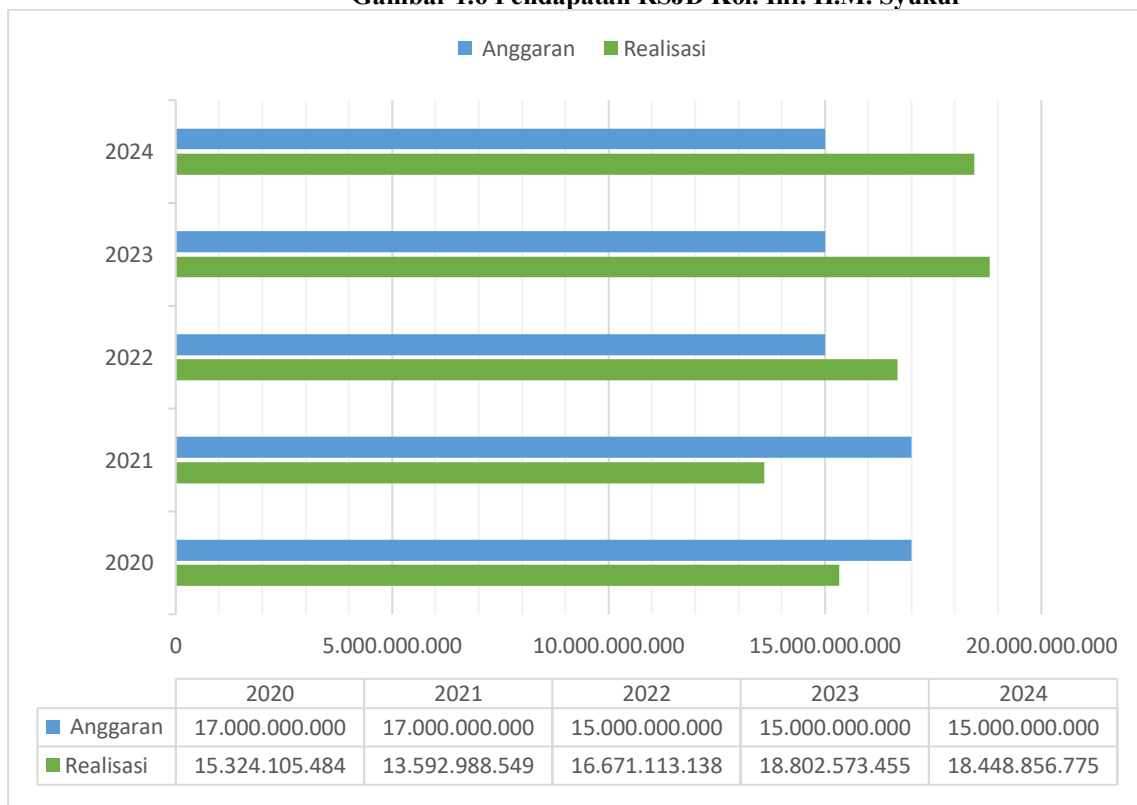
No	Uraian	Jumlah Penerimaan (Rp)
1.	Konsultasi Spesialis Jiwa	379.505.000
2.	Konsultasi Spesialis Syaraf	162.776.947
3.	Konsultasi Spesialis Anak	3.200.000
4.	Konsultasi Spesialis Penyakit Dalam	3.400.000
5.	Konsultasi Spesialis Bedah	400.000
6.	Konsultasi Spesialis Akupunktur	53.320.000
7.	Rehab Medik	15.710.000
8.	Konsultasi Gigi & Mulut	102.191.000
9.	Tindakan Medik MMPI	392.960.000
10.	Laboratorium	591.318.440
11.	Klinik Psikologi	105.600.000
12.	Fisiotherapi	81.545.000
13.	Terapi Okupasi	101.795.000
14.	Medical Logic / Visum	61.680.000
15.	Legalisir	697.500
16.	Surat Keterangan Sakit / SKBN	1.556.500
17.	Radiologi	8.615.000
18.	Karcis IPWL / IGD / Ambulance	9.340.714
19.	Jasmani	20.820.000
20.	Metadhon (PTRM)	5.096.000
21.	Obat	928.914.666
22.	Sewa Kantin / Rumah Jamur	18.895.340
23.	Gedung Koperasi / Hall	16.100.000
24.	Photocopy	7.750.000
25.	Parkir	21.393.000
26.	Tempat Penitipan Anak (TPA)	9.627.000
27.	Diklat	353.275.000
	Jumlah	3.457.662.107

Berikut ditampilkan tabel rincian target dan realisasi pendapatan RSJD Kol. Inf. H. M.Syukur Provinsi Jambi Tahun 2024 :

No	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1.	Pelayanan Rawat Jalan	2.550.000.000	3.457.662.107
2.	Pelayanan Rawat Inap	2.000.000.000	1.042.437.181
3.	BPJS Kes.	7.250.000.000	11.582.447.318
4.	Non BPJS Kes.	3.000.000.000	2.199.362.997
5.	Jasa Layanan Lain yang Sah	150.000.000	77.634.500
5.	Jasa Giro	50.000.000	89.312.672
	Jumlah	15.000.000.000	18.448.856.775

Tahun 2024 persentase pencapaian penerimaan RSJD Kol. Inf. H. M.Syukur Provinsi Jambi sampai dengan bulan Desember meningkat di banding tahun sebelumnya di bulan yang sama. Berikut ditampilkan grafik pendapatan RSJD Kol. Inf. H. M.Syukur Provinsi Jambi selama lima tahun:

Gambar 1.6 Pendapatan RSJD Kol. Inf. H.M. Syukur



2.2. Permasalahan dan Isu Strategis RSJD Kol. Inf. H.M. Syukur Jambi

2.2.1. Permasalahan Pelayanan RSJD Kol. Inf. H.M. Syukur Jambi

Setelah lebih dari 76 tahun Negara Indonesia merdeka, ternyata berbagai permasalahan pada bangsa ini selalu terjadi, tidak hanya permasalahan politik, kedaulatan NKRI, moral bangsa, masalah pendidikan termasuk juga masalah kesehatan. Masalah kesehatan jiwa masyarakat yang sering terjadi dan menjadi catatan tersendiri oleh pemerintah adalah maraknya kasus bunuh diri, kejahatan seksual baik pada anak-anak maupun pada orang dewasa, masalah meningkatnya angka penyalahgunaan NAPZA.

Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, memperkirakan bahwa sekitar 30–32 juta orang di Indonesia mengalami gangguan mental. Perkiraan ini didasarkan pada data global dari WHO yang menunjukkan bahwa 1 dari 8 orang di dunia mengalami gangguan mental. Berdasarkan data Riskesdas 2018, lebih dari 19 juta orang berusia di atas 15 tahun mengalami gangguan mental emosional, dan lebih dari 12 juta orang mengalami depresi. Survei I-NAMHS (Indonesia National Adolescent Mental Health Survey) menemukan bahwa sekitar 15,5 juta remaja Indonesia berusia 10–17 tahun mengalami gangguan mental. Satu dari tiga remaja mengalami gangguan mental, sementara satu dari dua puluh mengalami gangguan mental dalam 12 bulan terakhir.

Untuk mengatasi semua permasalahan di atas, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Rencana Strategi tahun 2025-2039, yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2025-2045 dengan tujuan memastikan seluruh penduduk Indonesia dapat hidup sehat sepanjang siklus hidup mereka, di semua wilayah, dan kelompok masyarakat. Hal ini mencakup peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Adapun strategi pencapaian sasaran kesehatan yaitu penguatan infrastruktur kesehatan, transformasi sistem kesehatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (sdm) dan peningkatan pembiayaan kesehatan. Pemerintah menerbitkan Undang – Undang Kesehatan Jiwa nomor 18 tahun 2014 dimana upaya kesehatan jiwa bertujuan untuk:

1. Menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa.
2. Menjamin setiap orang dapat mengembangkan berbagai potensi kecerdasan.
3. Memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa ODMK dan ODGJ berdasarkan hak asasi manusia.

4. Memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bagi ODMK dan ODGJ.
5. Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya dalam upaya kesehatan jiwa.
6. Meningkatkan mutu upaya kesehatan jiwa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Memberikan kesempatan kepada ODMK dan ODGJ untuk dapat memperoleh haknya sebagai warga negara Indonesia.

Saat ini berbagai masalah kesehatan juga sering terjadi dalam wilayah Provinsi Jambi antara lain banyaknya warga miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan, belum semua Puskesmas dan RS yang menyediakan pelayanan kesehatan jiwa dan masih terdapat orang dengan gangguan jiwa berat yang terlantar dan yang di pasung. Berdasarkan data dari hasil Riskesdas 2018, bahwa di Provinsi Jambi bahwa proporsi rumah tangga dengan anggota memiliki gangguan jiwa skizofrenia/psikosis adalah sebesar 6,6 permil, lebih rendah 0,1 permil bila dibandingkan dengan proporsi secara nasional. Prevalensi penyakit jiwa lainnya adalah:

1. Depresi, 1,8%; Nasional 6,1%.
2. Gangguan Mental Emosional 3,6%; Nasional 9,8%.

Selain permasalahan di atas, beberapa isu lain yang terkait masalah kesehatan jiwa masyarakat adalah adanya stigma buruk masyarakat terhadap orang dengan gangguan jiwa, dan masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemeliharaan kesehatan jiwanya. Berdasarkan data dan informasi di atas, permasalahan dalam pelayanan kesehatan jiwa di Provinsi Jambi dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Belum semua Puskesmas dan RS di kabupaten/kota yang membuka layanan jiwa.
2. Seringnya penolakan rujukan untuk pelayanan kesehatan non-jiwa ODGJ oleh RS lain di wilayah kerja RSJD Provinsi Jambi sedangkan SDM, sarana dan prasarana RSJD pendukung pelayanan kesehatan non-jiwa masih terbatas.
3. Belum optimalnya upaya promotif terkait kesehatan jiwa dan rehabilitasi penyalahgunaan NAPZA.
4. Kecenderungan pasien untuk memilih RS, yang didasari pertimbangan faktor biaya (murah) sampai pada faktor fasilitas RS (fisik megah, pelayanan spesialisik dan sub-spesialistik, penggunaan peralatan dengan teknologi canggih dan mutakhir).
5. Keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan cepat dan lengkap serta bermutu sehingga perlu profesionalisme pemberi layanan kesehatan.

6. Profesionalisme kinerja SDM yang belum optimal dengan pelaksanaan rewards dan punishments yang jelas juga dirasakan masih kurang.
7. Sistem layanan dan informasi yang belum optimal mengingat kemajuan teknologi informasi yang pesat sehingga RS perlu memperhatikan pentingnya manajemen sistem informasi, agar dapat digunakan untuk layanan monitoring dan evaluasi digital dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada pasien.
8. Manajemen aset RS sebagai pendukung pelayanan kesehatan yang bermutu yang masih belum optimal.
9. Adanya program jaminan kesehatan nasional tetapi belum memiliki mekanisme pelayanan maupun pembiayaan yang proporsional terutama bila dibandingkan dengan biaya pelayanan kesehatan yang diberikan.
10. Belum semua Kabupaten/Kota menganggarkan pembiayaan untuk pasien miskin atau terlantar melalui Jaminan Kesehatan Daerah yang belum terakomodir oleh BPJS. Hingga saat ini, hanya satu kabupaten yang menganggarkan Jamkesda (Kabupaten Tebo).
11. Sistem layanan yang belum optimal mengingat kemajuan teknologi informasi yang pesat sehingga RS perlu memperhatikan pentingnya manajemen sistem informasi, agar dapat digunakan untuk monitoring dan evaluasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pasien.
12. Masih banyaknya penduduk yang rentan dan hidup dibawah garis kemiskinan, dan tingkat pengangguran masyarakat yang cukup tinggi yang kemungkinan besar dapat mengancam kesehatan jiwa masyarakat tersebut.
13. Minimnya Peran lintas sektor terkait dalam memberikan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencegahan, peningkatan derajat kesehatan jiwa masyarakat.
14. Masyarakat semakin sadar akan hak-haknya sebagai pasien serta cenderung menyukai menempuh jalur hukum apabila ada hal-hal yang dianggapnya tidak benar dalam pelayanan RS yang diberikan kepadanya.
15. Keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan cepat dan lengkap serta bermutu sehingga perlu profesionalisme pemberi layanan kesehatan.
16. Kecenderungan pasien untuk memilih RS, yang didasari pertimbangan faktor biaya (murah) sampai pada faktor gaya hidup (fisik megah, pelayanan spesialisik, penggunaan peralatan dengan teknologi canggih).

Permasalahan yang akan dihadapi pada 5 (lima) tahun kedepan oleh RSJD Kol. Inf. H. M.Syukur Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

1. Belum tersedianya dokter spesialis tetap/full time untuk pelayanan spesialis radiologi untuk memenuhi standar pelayanan RS.
2. Profesionalisme SDM yang belum optimal dengan pelaksanaan reward dan punishment yang jelas juga dirasakan masih kurang.
3. Belum lengkapnya sarana dan prasarana untuk pelayanan kesehatan yang memenuhi standar RS.
4. Manajemen aset RS sebagai pendukung pelayanan kesehatan yang bermutu yang masih belum optimal.
5. Sistem layanan (SIMRS) yang belum optimal mengingat kemajuan teknologi informasi yang pesat sehingga RS perlu memperhatikan pentingnya manajemen sistem informasi, agar dapat digunakan untuk monitoring dan evaluasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pasien.

2.2.2. Isu Strategis RSJD Kol. Inf. H.M. Syukur Jambi

1. Isu Strategis yang terkait Mutu Pelayanan
 - a) Menyediakan sub-spesialis kesehatan jiwa Anak dan remaja di Provinsi Jambi.
 - b) Dalam upaya RS Jiwa meningkatkan tipe RS dari tipe B menjadi tipe A, RS berupaya untuk meningkatkan pelayanan dengan menambah pelayanan dokter spesialis Anak yang bisa di layani dengan pembiayaan umum maupun BPJS, dan akan menambah pelayanan dokter Spesialis Bedah,Obgyn, pelayanan Kamar Operasi,dan Perawatan Ruang ICU.
 - c) Jumlah SDM PNS masih terbatas, sehingga RS perlu merekrut tenaga kontrak dan menambah pembiayaan RS.
 - d) Profesionalisme SDM yang belum optimal dengan pelaksanaan reward dan punishment yang jelas juga dirasakan masih kurang.
 - e) Belum lengkapnya sarana dan prasarana untuk pelayanan kesehatan yang memenuhi standar RS.
 - f) Manajemen aset RS sebagai pendukung pelayanan kesehatan yang bermutu yang masih belum optimal.

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global (WHO, SDGs)	Nasional (RPJMN)	Regional (RPJMD)	
Pemerintah daerah, sesuai dengan UU No. 32/2004 dan PP No. 38/2007, memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di daerahnya. Tujuan utamanya adalah meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, termasuk melalui upaya-upaya promosi, pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi. Pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan SDM kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan mendorong inovasi teknologi kesehatan.	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Belum Sesuai Standar		Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta	Memperkuat Pelayanan Kesehatan berkualitas dan Tata kelola	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat	Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran RSJD Kol. Inf. H. M.Syukur Provinsi Jambi 2025 - 2029

Berdasarkan Tugas dan Fungsi RSJD Kolonel Inf. H.M. Syukur Provinsi Jambi, Tujuan pelaksanaan Program dan Kegiatan RSJD Kolonel Inf. H.M. Syukur yang tertuang dalam Renstra ini dirumuskan sebagai berikut:

“Terwujudnya Birokrasi Yang Berintegritas Dan Berbasis Digital “

Sasaran RSJD Kol. Inf. H.M. Syukur Jambi

Sasaran untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan RSJD Kolonel Inf. H.M. Syukur Provinsi Jambi yang tertuang dalam Renstra ini dirumuskan sebagai berikut:

”Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit”

3.2. Strategi dan arah Kebijakan RSJD Kol. Inf. H.M. Syukur Jambi 2025 - 2029

Strategi yang digunakan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi RSJD Provinsi Jambi, adalah :

1. Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
2. Pengembangan RSJD Kol. Inf. H. M.Syukur Provinsi Jambi
3. Peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan SDM pelayanan serta optimalisasi promosi kesehatan
4. Memperkuat sistem pengawasan, monitoring, penatausahaan dan pelaksanaan sistem keuangan.
5. Memperkuat sistem pelayanan dengan dukungan teknologi, sistem informasi dan penambahan tenaga spesialis non-jiwa.
6. Melengkapi Sarana, Prasarana termasuk peralatan medik dan non medik.

Arah Kebijakan RSJD Kol. Inf. H.M. Syukur Jambi

Kebijakan pelayanan kesehatan jiwa dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh RSJD Kol. Inf. H. M.Syukur Provinsi Jambi, diarahkan pada :

1. Membangun kepemimpinan dan manajemen kesehatan yang baik dan akuntabel, agar pelaksanaan program kesehatan bisa lebih efektif, efisien dan adil.
2. Peningkatan kepatuhan seluruh pelaksana pelayanan terhadap kebijakan dan standar SPO dalam pemberian pelayanan kesehatan.
3. Menerapkan peraturan – peraturan aparatur sipil negara terkait kedisiplinan.

4. Meningkatkan pendapatan RSJD Kol. Inf. H. M.Syukur Provinsi Jambi
5. Peningkatan sarana dan prasarana.
6. Pemberian kesempatan bagi pegawai untuk pendidikan dan pelatihan.
7. Memanfaatkan media dan stakeholders sebagai sarana promosi kesehatan jiwa.
8. Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kesehatan jiwa melalui kegiatan kesehatan jiwa masyarakat.

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN					KET.
				2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
-Meningkatnya kualitas hidup masyarakat -Terciptanya ekosistem inovasi di Provinsi Jambi -Terwujudnya birokrasi yang berintegritas dan berbasis digital -Meningkatnya sumber daya manusia terdidik, berkebudayaan maju dan berkesetaraan gender -Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan -Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah -Meningkatnya stabilitas ekonomi makro -Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat -Meningkatnya skala ekonomi masyarakat dan daerah -Meningkatnya kualitas lingkungan -Meningkatnya pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi masyarakat	Terwujudnya Birokrasi Yang Berintegritas Dan Berbasis Digital		Indeks Pelayanan Publik	3,35	3,39	3,42	3,45	3,5	
		Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit	Persentase Capaian Strata Kompetensi Layanan Minimal Utama	16,7 %	29,1 %	45,8 %	50 %	58,3 %	

Arah Kebijakan RSJD Kol. Inf. H.M. Syukur Jambi

Kebijakan pelayanan kesehatan jiwa dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh RSJD Kol. Inf. H. M.Syukur Provinsi Jambi, diarahkan pada :

1. Membangun kepemimpinan dan manajemen kesehatan yang baik dan akuntabel, agar pelaksanaan program kesehatan bisa lebih efektif, efisien dan adil.
2. Peningkatan kepatuhan seluruh pelaksana pelayanan terhadap kebijakan dan standar SPO dalam pemberian pelayanan kesehatan.
3. Menerapkan peraturan – peraturan aparatur sipil negara terkait kedisiplinan.
4. Meningkatkan pendapatan RSJD Kol. Inf. H. M.Syukur Provinsi Jambi
5. Peningkatan sarana dan prasarana.
6. Pemberian kesempatan bagi pegawai untuk pendidikan dan pelatihan.
7. Memanfaatkan media dan stakeholders sebagai sarana promosi kesehatan jiwa.
8. Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kesehatan jiwa melalui kegiatan kesehatan jiwa masyarakat.

Tabel 3.4 Penahapan Renstra PD

Tahap I (2026) (1)	Tahap II (2027) (2)	Tahap III (2028) (3)	Tahap IV (2029) (4)	Tahap V (2030) (5)
Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Pengembangan RSJD Provinsi Jambi	Peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan SDM pelayanan serta optimalisasi promosi kesehatan	Memperkuat sistem pengawasan, monitoring, penatausahaan dan pelaksanaan sistem keuangan.	Memperkuat sistem pelayanan dengan dukungan teknologi, sistem informasi dan penambahan tenaga spesialis non-jiwa.
Melengkapi Sarana, Prasarana termasuk peralatan medik dan non medik.				

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatnya sumber daya manusia terdidik, berkebudayaan maju dan berkesetaraan gender	Meningkatkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Membangun kepemimpinan dan manajemen kesehatan yang baik dan akuntabel, agar pelaksanaan program kesehatan bisa lebih efektif, efisien dan adil.	
	Terwujudnya birokrasi yang berintegritas dan berbasis digital	Meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah serta pengembangan gerakan pemberantasan korupsi	Peningkatan kepatuhan seluruh pelaksana pelayanan terhadap kebijakan dan standar SPO dalam pemberian pelayanan kesehatan	
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan pengelolaan keuangan untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian	Menerapkan peraturan – peraturan aparatur sipil negara terkait kedisiplinan	
	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah	Meningkatkan pengawasan, pembinaan kinerja dan penerapan disiplin disertai reward dan punishment yang tegas bagi pelanggaran sumpah jabatan, aturan disiplin dan etika birokrasi	Meningkatkan pendapatan RSJD Kol. Inf.H.M.Syukur Provinsi Jambi.	
	Meningkatnya stabilitas ekonomi makro	Meningkatkan budaya hukum secara terintegrasi melalui jalur pendidikan formal, informal dan non formal	Peningkatan sarana dan prasarana.	
	Meningkatnya skala ekonomi masyarakat dan daerah	Menyelesaikan penataan batas wilayah provinsi	Pemberian kesempatan bagi pegawai untuk pendidikan dan pelatihan.	
	Terciptanya ekosistem inovasi di Provinsi Jambi	Penegakan hukum terhadap pelanggaran PERDA secara tegas, profesional, dan adil dengan penguatan kelembagaan dan personil PPNS dengan peningkatan jumlah dan kualitas PPNS daerah	Memanfaatkan media dan stakeholders sebagai sarana promosi kesehatan jiwa.	
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatkan kinerja birokrasi melalui perbaikan prosedur kerja, pemanfaatan teknologi, transparansi serta regulasi, pengawasan, penegakan aturan dan peningkatan tunjangan daerah	Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kesehatan jiwa melalui kegiatan kesehatan jiwa masyarakat	
	Meningkatnya kualitas lingkungan	Menerapkan budaya kerja inovatif		
	Meningkatnya pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk	Peningkatan kapasitas ASN dan PPPK		

	peningkatan ekonomi masyarakat			
	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat			

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Program dan kegiatan adalah hakikat dari perencanaan dan menjelaskan apa yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan. Program dan kegiatan yang dirumuskan dan tertuang dalam Rencana strategis RSJD Kol. Inf. H. M. Syukur Provinsi Jambi **sesuai dengan program dan kegiatan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1-2850 Tahun 2025 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenclatur perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah agar dapat dianggarkan dalam APBD Provinsi Jambi.** Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, maka program/kegiatan RSJD Kol. Inf. H. Muhammad Syukur Provinsi Jambi untuk kurun waktu 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan:

- a) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 1. Pengadaan Pakaian Dinas dan Beserta Atribut Kelengkapannya
 2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- c) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 2. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f) Peningkatan Pelayanan BLUD

1. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
- g) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- h) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

B. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya Kesehatan Masyarakat.

Kegiatan:

- a) Penyediaan Fasilitas Pelayanan, sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
 1. Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
 3. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
 4. Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
 5. Pemeliharaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
 6. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
- b) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKKM dan UKM Rujukan Tingkat daerah Provinsi
 1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 2. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
 3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan jiwa (ODMK)
 4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA
 5. Pengelolaan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
 6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji
 7. Pengelolaan rujukan dan rujuk baliks
- c) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
 1. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

- d) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
1. Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Terwujudnya Birokrasi Yang Berintegritas Dan Berbasis Digital				Indeks Pelayanan Publik		
		Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit			Persentase Capaian Strata Kompetensi Layanan Minimal Utama	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah b. Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 4.Administrasi Umum Perangkat Daerah	

						a. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor b. Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan b. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 8. Peningkatan Pelayanan BLUD a. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan,	
--	--	--	--	--	--	---	--

						UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi a. Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya b. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan c. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan jiwa (ODMK) d. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA e. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular f. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji g. Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik 2. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi a. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 3. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi a. Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	
--	--	--	--	--	--	---	--

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATA N/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Terwujudnya kualitas pelayanan public yang prima dan akuntabel	-Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	70,24	72,5	Rp. 123.407.000.000	73	Rp. 126.932.000.000	73,5	Rp. 139.610.000.000	74	Rp. 153.557.000.000	75	Rp. 168.897.000.000	
	-Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)(Indeks)	85	86		87		87,5		88		88,5		
	-Hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Kategori PD (Nilai)	90	90,8		91		91,5		92		92,5		
Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	-	85%	Rp. 899.000.000	85%	Rp. 1.073.000.000	85%	Rp. 1.250.000.000	85%	Rp. 1.400.000.000	85%	Rp. 1.485.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	-	4 dok	Rp. 200.000.000	4 dok	Rp. 250.000.000	4 dok	Rp. 300.000.000	4 dok	Rp. 350.000.000	4 dok	Rp. 350.000.000	
Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	-	4 dok	Rp. 500.000.000	4 dok	Rp. 550.000.000	4 dok	Rp. 600.000.000	4 dok	Rp. 650.000.000	4 dok	Rp. 650.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan (Laporan)	-	3 laporan	Rp. 199.000.000	3 laporan	Rp. 273.000.000	3 laporan	Rp. 350.000.000	3 laporan	Rp. 400.000.000	3 laporan	Rp. 485.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATA N/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Rp. 70.700.000. 000	100 %	Rp. 70.870.000. 000	100 %	Rp. 78.457.000. 000	100 %	Rp. 83.400.000. 000	100 %	Rp. 87.300.000. 000	
Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (org/bln)	3.300 org/bln	3.650 org/bln	Rp. 70.700.000.0 00	3700 org/bln	Rp. 70.870.000. 000	3750 org/bln	Rp. 78.457.000. 000	3800 org/bln	Rp. 83.400.000. 000	4000 org/bln	Rp. 87.300.000. 000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	-	95 %	Rp. 1.350.000.0 00	95 %	1.500.000.0 00	95 %	Rp. 1.650.000.0 00	95 %	Rp. 2.000.000.0 00	95 %	Rp. 3.000.000.0 00	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	-	550 Paket	Rp. 350.000.000	660 Paket	Rp. 400.000.000	750 Paket	Rp. 450.000.000	1100 Paket	Rp. 700.000.000	1660 Paket	Rp. 1.000.000.0 00	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (org)	-	75 org	Rp. 1.000.000.0 00	80 org	Rp. 1.100.000.0 00	85 org	Rp. 1.200.000.0 00	90 org	Rp. 1.300.000.0 00	100 org	Rp. 2.000.000.0 00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase adminstrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan	-	96 %	Rp. 3.050.000.0 00	96 %	Rp. 3.350.000.0 00	96 %	Rp. 3.700.000.0 00	96 %	Rp. 4.650.000.0 00	96 %	Rp. 5.400.000.0 00	
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	45 Paket	Rp. 2.050.000.0 00	46 Paket	Rp. 2.200.000.0 00	50 Paket	Rp. 2.400.000.0 00	60 Paket	Rp. 3.000.000.0 00	65 Paket	Rp. 3.500.000.0 00	
Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	-	14 Paket	Rp. 500.000.000	14 Paket	Rp. 550.000.000	14 Paket	Rp. 600.000.000	14 Paket	Rp. 650.000.000	14 Paket	Rp. 700.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	4 Laporan	Rp. 500.000.000	4 Laporan	Rp. 600.000.000	4 Laporan	Rp. 700.000.000	4 Laporan	Rp. 1.000.000.0 00	4 Laporan	Rp. 1.200.000.0 00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	-	90%	Rp. 11.800.000. 000	90%	Rp. 10.330.000. 000	90%	Rp. 10.043.000. 000	90%	Rp. 11.100.000. 000	90%	Rp. 13.200.000. 000	
Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	-	8 unit	Rp. 3.500.000.0 00	1 unit	Rp. 1.200.000.0 00	1 unit	Rp. 500.000.000	1 unit	Rp. 500.000.000	1 unit	Rp. 500.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATA N/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Operasional atau Lapangan													
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan (Unit)	-	30 unit	Rp. 8.300.000.000	31 unit	Rp. 9.130.000.000	33 unit	Rp. 9.543.000.000	34 unit	Rp. 10.600.000.000	36 unit	Rp. 12.700.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	98 %	98 %	Rp. 7.508.000.000	98 %	Rp. 9.209.000.000	98 %	Rp. 10.910.000.000	98 %	Rp. 13.511.000.000	98 %	Rp. 16.712.000.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4 Laporan	4 Laporan	Rp. 8.000.000	4 Laporan	Rp. 9.000.000	4 Laporan	Rp. 10.000.000	4 Laporan	Rp. 11.000.000	4 Laporan	Rp. 12.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4 Laporan	4 Laporan	Rp. 2.500.000.000	4 Laporan	Rp. 3.000.000.000	4 Laporan	Rp. 3.500.000.000	4 Laporan	Rp. 5.000.000.000	4 Laporan	Rp. 6.700.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4 Laporan	4 Laporan	Rp. 5.000.000.000	4 Laporan	Rp. 6.200.000.000	4 Laporan	Rp. 7.400.000.000	4 Laporan	Rp. 8.500.000.000	4 Laporan	Rp. 10.000.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	95 %	95 %	Rp. 8.100.000.000	95 %	Rp. 8.600.000.000	95 %	Rp. 9.600.000.000	95 %	Rp. 11.496.000.000	95 %	Rp. 13.800.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	-	46 unit	Rp. 1.000.000.000	46 unit	Rp. 1.000.000.000	46 unit	Rp. 1.000.000.000	46 unit	Rp. 1.000.000.000	46 unit	Rp. 1.000.000.000	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2 unit	20 unit	Rp. 7.100.000.000	20 unit	Rp. 7.600.000.000	22 unit	Rp. 8.600.000.000	22 unit	Rp. 10.496.000.000	24 unit	Rp. 12.800.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATA N/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	86	Rp. 20.000.000.000	87	Rp. 22.000.000.000	87,5	Rp. 24.000.000.000	88	Rp. 26.000.000.000	88,5	Rp. 28.000.000.000	
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Rp. 20.000.000.000	1 Unit Kerja	Rp. 22.000.000.000	1 Unit Kerja	Rp. 24.000.000.000	1 Unit Kerja	Rp. 26.000.000.000	1 Unit Kerja	Rp. 28.000.000.000	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase ketercapaian INM (Indikator Nasional Mutu) di Rumah Sakit (%)	85 %	86,5 %	Rp. 44.061.000.000	87 %	Rp. 48.467.000.000	88 %	Rp. 53.313.000.000	89 %	Rp. 58.645.000.000	92,3 %	Rp. 64.509.000.000	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas Pelayanan, sarana & prasarana dan alat kesehatan yang terpenuhi	95%	95%	Rp. 34.050.000.000	95%	Rp. 36.900.000.000	95%	Rp. 41.143.000.000	95%	Rp. 45.300.000.000	95%	Rp. 49.350.000.000	
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang ditingkatkan sarana dan prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar (Unit)	-	5 unit	Rp. 9.000.000.000	5 unit	Rp. 9.200.000.000	5 unit	Rp. 10.000.000.000	5 unit	Rp. 11.000.000.000	5 unit	Rp. 11.500.000.000	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Yang Dilakukan Rehabilitasi Dan	-	5 unit	Rp. 5.000.000.000	5 unit	Rp. 5.600.000.000	6 unit	Rp. 6.000.000.000	5 unit	Rp. 6.500.000.000	5 unit	Rp. 7.000.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATA N/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)												
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan, Alat Penunjang Medik, Fasilitas Layanan Kesehatan Yang Disediakan (Unit)	3 unit	8 unit	Rp. 4.600.000.000	10 unit	Rp. 5.000.000.000	10 unit	Rp. 5.900.000.000	11 unit	Rp. 6.500.000.000	12 unit	Rp. 7.350.000.000	
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional/regional maintance center yang disediakan dan dipelihara (Unit)	-	205 unit	Rp. 2.000.000.000	205 unit	Rp. 2.100.000.000	205 unit	Rp. 3.043.000.000	215 unit	Rp. 3.500.000.000	215 unit	Rp. 4.000.000.000	
Pemeliharaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	-	20 unit	Rp. 950.000.000	20 unit	Rp. 2.000.000.000	22 unit	Rp. 2.200.000.000	23 unit	Rp. 2.800.000.000	24 unit	Rp. 3.500.000.000	
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	2 paket	3 paket	Rp. 12.500.000.000	3 paket	Rp. 13.000.000.000	3 paket	Rp. 14.000.000.000	3 paket	Rp. 15.000.000.000	3 paket	Rp. 16.000.000.000	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKKM dan UKM Rujukan Tingkat daerah Provinsi	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKKM dan UKM Rujukan Tingkat daerah Provinsi	95%	95%	Rp. 9.541.000.000	95%	Rp. 11.030.000.000	95%	Rp. 11.630.000.000	95%	Rp. 12.765.000.000	95%	Rp. 14.550.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	4 dok	4 dok	Rp. 250.000.000	4 dok	Rp. 300.000.000	4 dok	Rp. 400.000.000	4 dok	Rp. 450.000.000	4 dok	Rp. 500.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	-	4 dok	Rp. 291.000.000	4 dok	Rp. 300.000.000	4 dok	Rp. 330.000.000	4 dok	Rp. 365.000.000	4 dok	Rp. 400.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATA N/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Promosi Kesehatan (Dokumen)												
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	4 dok	4 dok	Rp. 5.000.000.000	4 dok	Rp. 6.000.000.000	4 dok	Rp. 6.200.000.000	4 dok	Rp. 7.000.000.000	4 dok	Rp. 8.000.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis	-	100 org	Rp. 500.000.000	105 org	Rp. 550.000.000	110 org	Rp. 600.000.000	110 org	Rp. 600.000.000	120 org	Rp. 650.000.000	
Pengelolaan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	-	4 dok	Rp. 2.500.000.000	4 dok	Rp. 2.600.000.000	4 dok	Rp. 2.700.000.000	4 dok	Rp. 2.900.000.000	4 dok	Rp. 3.500.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	-	1 dok	Rp. 500.000.000	1 dok	Rp. 550.000.000	1 dok	Rp. 600.000.000	1 dok	Rp. 650.000.000	1 dok	Rp. 700.000.000	
Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dokumen)	-	12 dok	Rp. 500.000.000	12 dok	Rp. 730.000.000	12 dok	Rp. 800.000.000	12 dok	Rp. 800.000.000	12 dok	Rp. 800.000.000	
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	97%	Rp. 200.000.000	97%	Rp. 250.000.000	97%	Rp. 250.000.000	97%	Rp. 280.000.000	97%	Rp. 300.000.000	
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	-	4 dok	Rp. 200.000.000	4 dok	Rp. 250.000.000	4 dok	Rp. 250.000.000	4 dok	Rp. 280.000.000	4 dok	Rp. 300.000.000	
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan	Persentase Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	98%	Rp. 270.000.000	98%	Rp. 287.000.000	98%	Rp. 290.000.000	98%	Rp. 300.000.000	98%	Rp. 309.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATA N/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	yang memenuhi persyaratan akreditasi												
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	-	1 unit	Rp. 270.000.000	1 unit	Rp. 287.000.000	1 unit	Rp. 290.000.000	1 unit	Rp. 300.000.000	1 unit	Rp. 309.000.000	

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					KET.
			2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Capaian Strata Kompetensi Layanan Minimal Utama	%	16,7 %	29,1 %	45,8 %	50 %	58,3 %	

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah di Lingkup Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dan arahan bagi masing-masing Perangkat Daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Jambi sesuai dengan posisi dan peran yang diemban yang berpedoman kepada RPJMD Provinsi Jambi 2025-2030. Renstra SKPD ini akan menjadi dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing Perangkat daerah.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan dari seluruh *stakeholders* yang ada, kerjasama yang kuat antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota, serta kerjasama dengan perguruan tinggi, pihak swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat umum.